



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TETI ARNITA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 183906

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 951.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/224 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA NATUNA, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. Tanah Seluas 307 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, WARISAN Rp. 5.000.000
5. Tanah Seluas 1297 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, WARISAN Rp. 10.000.000
6. Tanah Seluas 3040 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, WARISAN Rp. 10.000.000
7. Tanah Seluas 3461 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, WARISAN Rp. 10.000.000
8. Tanah Seluas 9564 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, WARISAN Rp. 12.000.000
9. Tanah Seluas 4062 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, WARISAN Rp. 7.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 37.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2013, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	76.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	55.050.694
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.119.550.694
III. HUTANG	Rp.	32.902.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.086.648.694

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.